

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Ilmu sosial adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang manusia dalam berbagai konteks sosial, seperti ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam transaksi dan pengelolaan sumber daya langka, serta ilmu politik yang mengkaji cara manusia memperoleh kekuasaan satu sama lain. Begitu pula dengan Hubungan Internasional, sebagai bagian dari ilmu sosial yang mengkaji tentang interaksi antara aktor internasional yang melintasi batas negara.

Hubungan Internasional merupakan segala hubungan yang melewati batas negara dan berjalan secara dinamis, mengikuti perkembangan kehidupan sosial manusia, dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan antar negara, serta sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang terus berkembang. Ilmu Hubungan Internasional dianggap sebagai disiplin ilmu yang sangat dinamis karena mengkaji dinamika fenomena internasional. Oleh karena itu, fokus, metode, dan teori dalam studi Hubungan Internasional senantiasa berubah-ubah secara cepat sesuai dengan perkembangan fenomena internasional dan kondisi dunia secara global. Spektrum

dinamis dalam studi Hubungan Internasional tercermin dalam perbedaan definisi tentang studi Hubungan Internasional sejak masa Perang Dingin hingga saat ini.

Ilmu Hubungan Internasional, Viotti dan Kauppi menggambarkan Hubungan Internasional sebagai kajian yang memfokuskan pada interaksi antara berbagai aktor internasional, seperti negara, organisasi internasional, aktor non-negara, dan individu, dalam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di tingkat global. Definisi ini menekankan pada pentingnya pemahaman terhadap kompleksitas hubungan antaraktor internasional dalam konteks global yang melibatkan berbagai dimensi dan sektor kehidupan internasional. Dalam pengertian ini, Hubungan Internasional dilihat sebagai studi yang mengakui keragaman aktor, isu, dan bidang dalam arena internasional, serta mengakui pentingnya memahami dinamika yang kompleks antara mereka dalam menjalani interaksi dan menghadapi tantangan global yang beragam. (Viotti, P.R., & Kauppi, M.V, 2018:5).

Hubungan Internasional, Owens menggambarkan bahwa studi ilmiah ini yang memfokuskan pada hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional, melibatkan analisis yang mendalam terkait kebijakan luar negeri, diplomasi, perjanjian internasional, serta konflik internasional. Definisi ini menekankan pada sifat ilmiah dan pendekatan analitis dalam mempelajari interaksi antara negara-negara, serta aspek kebijakan luar negeri dan konflik internasional sebagai objek kajian yang relevan. Dalam pengertian ini, Hubungan Internasional dipahami sebagai sebuah bidang studi yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami dinamika hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk analisis kebijakan luar negeri,

diplomasi, perjanjian internasional, serta konflik internasional sebagai fenomena yang menjadi fokus penelitian. (Baylis, J., et.al, 2017:6)

Aktor Negara maupun non-negara, Burchill mengatakan, Hubungan Internasional sebagai suatu bidang studi yang memfokuskan pada interaksi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan antara negara-negara dalam sistem internasional, serta peran penting aktor-aktor non-negara dalam dinamika hubungan internasional. Definisi ini memberikan penekanan pada pentingnya memahami hubungan antara aktor negara dan non-negara, serta berbagai dimensi yang terlibat dalam dinamika hubungan internasional. Dalam pengertian ini, Hubungan Internasional dipahami sebagai sebuah bidang studi yang melibatkan analisis tentang interaksi kompleks antara negara-negara dalam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di tingkat internasional. Selain itu, definisi ini juga menggarisbawahi peran penting aktor-aktor non-negara, seperti organisasi internasional, aktor non-pemerintah, dan individu, dalam membentuk dinamika hubungan internasional. (Burchill, S., et.al, 2005:189-190)

Hubungan antar negara, Goldstein dan Pevehouse menggambarkan Hubungan Internasional sebagai suatu disiplin akademik yang memfokuskan pada studi tentang hubungan antar negara, yang mencakup analisis tentang kebijakan luar negeri, diplomasi, organisasi internasional, perdagangan internasional, serta konflik internasional. Definisi ini menekankan pada berbagai topik dan konsep yang dikaji dalam disiplin Hubungan Internasional, seperti kebijakan luar negeri, diplomasi, organisasi internasional, dan perdagangan internasional. Dalam pengertian ini, Hubungan Internasional dipahami sebagai suatu disiplin akademik yang mempelajari

dinamika kompleks antara negara-negara dalam konteks sistem internasional, serta menganalisis berbagai aspek kebijakan luar negeri, interaksi diplomasi, peran organisasi internasional, dinamika perdagangan internasional, dan konflik internasional yang terjadi di tingkat internasional. (Goldstein, J.S., & Pevehouse, J.C., 2017:9-10).

Dalam karya "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" yang ditulis oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, dijelaskan bahwa:

“Banyak definisi yang menggambarkan studi tentang Hubungan Internasional sebagai kajian terhadap interaksi antara aktor-aktor yang melibatkan batasan negara. Fenomena ini menjadi suatu keharusan mengingat adanya ketergantungan dan kompleksitas dalam kehidupan manusia di dunia internasional, yang mengakibatkan adanya interdependensi dan tidak memungkinkan adanya negara yang bersifat tertutup terhadap dunia luar.” (Perwita & Yani, 2005: 3-4)

“Studi mendalam dalam bidang Hubungan Internasional selalu dihadapkan pada perkembangan baru dalam dimensi politik internasional itu sendiri, yaitu pola interaksi antara negara-negara. Pola interaksi tersebut menunjukkan kecenderungan dari negara-negara, terutama negara-negara besar dan maju, untuk melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil. Dalam proses ini, terlihat adanya karakter hubungan yang kompetitif yang berpotensi mempengaruhi kepentingan politik dan dapat berkembang menjadi konflik. Konflik tersebut dapat terjadi dalam skala regional maupun global, dan akan mempengaruhi negara-negara yang berupaya memperjuangkan kepentingan nasional mereka dalam hubungan dengan negara-negara

lain, melalui tindakan di luar batas wilayah mereka, seperti pemisahan kubu, persekutuan/aliansi, atau koalisi diplomatik lainnya. Pola interaksi hubungan internasional seperti ini akan berdampak pada tatanan dunia internasional secara keseluruhan.” (Sitepu, 2011:7).

Menurut Cox, Hubungan Internasional merupakan studi yang memfokuskan pada distribusi kekuasaan dalam skala internasional, melibatkan analisis hubungan antara negara-negara, ekonomi politik internasional, dan konflik internasional. Definisi ini menyoroti pentingnya memahami aspek kekuasaan dan distribusi kekuasaan dalam konteks hubungan internasional, serta mengakui peran signifikan faktor ekonomi politik dalam konteks global. (Cox, R. W., 1981: 126-155).

Teori Hubungan Internasional: Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Arab Saudi. Misalnya, teori realisme dalam hubungan internasional dapat digunakan untuk menganalisis pertimbangan keamanan dan kepentingan nasional Turki dalam membentuk kebijakan luar negeri mereka terhadap Arab Saudi.

2.1.2 Kebijakan Luar Negeri

Teori pengambilan keputusan merupakan Salah satu metode untuk memahami perilaku suatu negara dalam konteks hubungan internasional adalah melalui analisis pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan melibatkan aspek-aspek dalam sistem internal dan eksternal yang perlu dipertimbangkan oleh negara. Faktor-faktor

yang terlibat dalam interaksi internal dan eksternal akan membentuk preferensi negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Faktor internal lebih menekankan pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat negara tersebut, sedangkan faktor eksternal lebih mengacu pada struktur internasional seperti hubungan dengan negara-negara lain dan kondisi global. Pengambilan Kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem politik internasional di dalamnya. Selain itu, tekanan dari aktor internasional, kondisi dalam negeri, keadaan ekonomi, tingkat konflik etnis, tradisi sejarah, dan tingkat intelektualitas juga turut memengaruhi kebijakan publik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Leichter pada tahun 1979 terdapat empat faktor yang berperan dalam mempengaruhi kebijakan tersebut:

1. Faktor situasional atau perubahan yang tiba-tiba dapat mempengaruhi kebijakan yang sebelumnya dianggap tidak relevan dalam konteks situasi lain.
2. Faktor struktural, seperti tingkat ekonomi dasar, demografi, dan sosial suatu negara, dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan.
3. Faktor budaya dan politik mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kepercayaan kepada pemerintah dalam memberikan perubahan, termasuk faktor bahasa, agama, dan nilai-nilai sosial dalam budaya masyarakat.
4. Faktor lingkungan, baik eksternal maupun internasional, dapat meningkatkan saling ketergantungan antar negara.

Kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh suatu negara dipandang sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional dari masyarakat yang diperintah, meskipun pemahaman mengenai kepentingan nasional suatu negara atau arah

kebijakan luar negeri saat itu ditentukan oleh pihak yang berkuasa pada saat itu. (Mas'oed, 1994:184).

Kebijakan Luar Negeri, Cohen, B.J merupakan strategi yang ditempuh oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Cohen juga menekankan bahwa dalam studi hubungan internasional terdapat beragam teori yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis kebijakan luar negeri, seperti realisme, liberalisme, konstruktivisme, dan teori-teori lainnya. Pendekatan teoretis ini memungkinkan untuk menganalisis kebijakan luar negeri dengan memperhatikan berbagai pandangan dan kerangka pemikiran yang berbeda dari setiap teori. Oleh karena itu, sumber ini dapat menjadi referensi penting dalam memahami konsep dan teori-teori yang digunakan dalam studi kebijakan luar negeri. (Cohen, B.J. 2013:298-299)

Kebijakan Luar Negeri, Hudson Kebijakan luar negeri mengacu pada rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam mengatur hubungannya dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Kebijakan luar negeri melibatkan berbagai aspek, termasuk tujuan, strategi, dan tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam mempromosikan dan melindungi kepentingan nasionalnya di tingkat internasional. Dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, digunakan teori-teori klasik dan kontemporer, seperti pendekatan realis, liberal, konstruktivis, dan kritis, untuk memahami dinamika kebijakan luar negeri tersebut. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja dalam memahami bagaimana negara-negara mengambil keputusan dalam menghadapi isu-isu internasional, bagaimana kepentingan dan

preferensi nasional mempengaruhi kebijakan luar negeri, serta bagaimana faktor-faktor domestik dan internasional memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Selain itu, proses pembuatan kebijakan luar negeri juga melibatkan tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan, peran aktor-aktor dalam sistem politik internasional, serta faktor-faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Metode analisis yang digunakan dalam studi kebijakan luar negeri juga menjadi bagian penting dalam memahami aspek-aspek tersebut. (Hudson, V.M. 2017: 33)

Dalam bukunya "Theories of International Relations and Foreign Policy" yang diterbitkan pada tahun 2017, Holsti menyajikan beberapa teori yang relevan dalam konteks kebijakan luar negeri, antara lain:

1. Teori Kebijakan Luar Negeri Rasional: Teori ini menekankan pada asumsi bahwa aktor dalam kebijakan luar negeri bertindak secara rasional dan mengoptimalkan kepentingan nasional mereka. Pendekatan ini menyoroti pengambilan keputusan yang didasarkan pada kalkulasi rasional dan analisis kepentingan nasional, termasuk pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan.
2. Psikologi Kebijakan Luar Negeri: Teori ini menggarisbawahi peran psikologi dalam pembuatan kebijakan luar negeri, termasuk faktor-faktor seperti persepsi, sikap, keyakinan, dan emosi individu atau kelompok dalam mempengaruhi perilaku dan keputusan dalam konteks kebijakan luar negeri. Pendekatan ini mengakui bahwa faktor psikologis dapat memengaruhi kebijakan luar negeri, baik secara positif maupun negatif.

3. Teori Kognitif dan Sosial: Teori ini menyoroti peran proses kognitif dan sosial dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pendekatan ini melibatkan studi tentang bagaimana aktor dalam kebijakan luar negeri mengakses, memproses, dan menginterpretasi informasi, serta bagaimana faktor sosial seperti norma, identitas, dan budaya mempengaruhi kebijakan luar negeri. (Holsti, K.J. 2017: 7-8).

Teori Kebijakan Luar Negeri: Teori kebijakan luar negeri dapat digunakan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan luar negeri Turki terhadap Arab Saudi di bawah kepemimpinan Erdogan. Misalnya, teori rasionalitas dalam pembuatan kebijakan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan rasional seperti kepentingan nasional dan manfaat yang diharapkan mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki terhadap Arab Saudi.

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah bagian yang sangat penting dalam hubungan internasional, yang mempengaruhi interaksi antara negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, dalam menjalankan hubungan internasional, setiap negara harus memiliki kepentingan nasionalnya sendiri. Kepentingan nasional merupakan tujuan atau keinginan yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam berinteraksi dalam Hubungan Internasional.

Dalam Karya, Rochester, dalam Buku berjudul *The National Interest and Contemporary World Politics*. Kepentingan Nasional merujuk pada tujuan dan

kebijakan suatu negara untuk melindungi dan mempromosikan kepentingannya sendiri dalam hubungan internasional, yang melibatkan upaya untuk mencapai keamanan, kesejahteraan ekonomi, stabilitas politik, dan pengaruh internasional. Kepentingan nasional dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada faktor-faktor seperti geografi, sejarah, ekonomi, nilai-nilai politik, dan prioritas kebijakan pemerintah. Kepentingan nasional juga dapat berubah seiring waktu, tergantung pada perubahan dalam dinamika politik dan ekonomi internasional, serta pergeseran dalam kebijakan pemerintah. Kepentingan nasional juga dapat dipahami dalam konteks hubungan antara negara dengan aktor-aktor internasional lainnya, termasuk negara-negara lain, organisasi internasional, serta kelompok non-negara seperti perusahaan multinasional, kelompok masyarakat, dan individu. Studi tentang kepentingan nasional melibatkan analisis terhadap faktor-faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan luar negeri suatu negara, serta hubungannya dengan isu-isu global dan regional (Rochester, 1978: 6-10).

Dalam karyanya "Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace", Morgenthau mengemukakan bahwa kepentingan nasional merupakan dorongan mendasar yang mendorong tindakan politik suatu negara, yang didasarkan pada upaya untuk memperoleh kekuasaan dan menjaga keamanan negara, serta merupakan faktor sentral dalam hubungan internasional. (Morgenthau, H. J. (1948:73).

Dalam bukunya "Theory of International Politics", Waltz berargumen bahwa kepentingan nasional menjadi faktor sentral yang memengaruhi perilaku suatu negara dalam hubungan internasional. Menurut Waltz, negara cenderung bertindak untuk

melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional mereka, seperti keamanan, ekonomi, dan politik, guna mencapai tujuan nasional di dalam sistem internasional. (Waltz, K. N. 1979:39).

Dalam bukunya "War and Change in World Politics", Gilpin menjelaskan bahwa konsep kepentingan nasional merupakan faktor kunci dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Gilpin berpendapat bahwa negara-negara cenderung bertindak untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional mereka, yang dapat mencakup aspek ekonomi, politik, keamanan, dan kebudayaan, dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional menjadi landasan bagi negara-negara dalam mengambil keputusan dan menghadapi perubahan dalam politik dunia. (Waltz, K. N. 2001:111-112).

Teori Kepentingan Nasional: Teori kepentingan nasional dapat digunakan untuk menganalisis kepentingan nasional Turki yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri mereka terhadap Arab Saudi. Misalnya, teori kepentingan nasional dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan ekonomi, politik, dan keamanan nasional Turki mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka terhadap Arab Saudi.

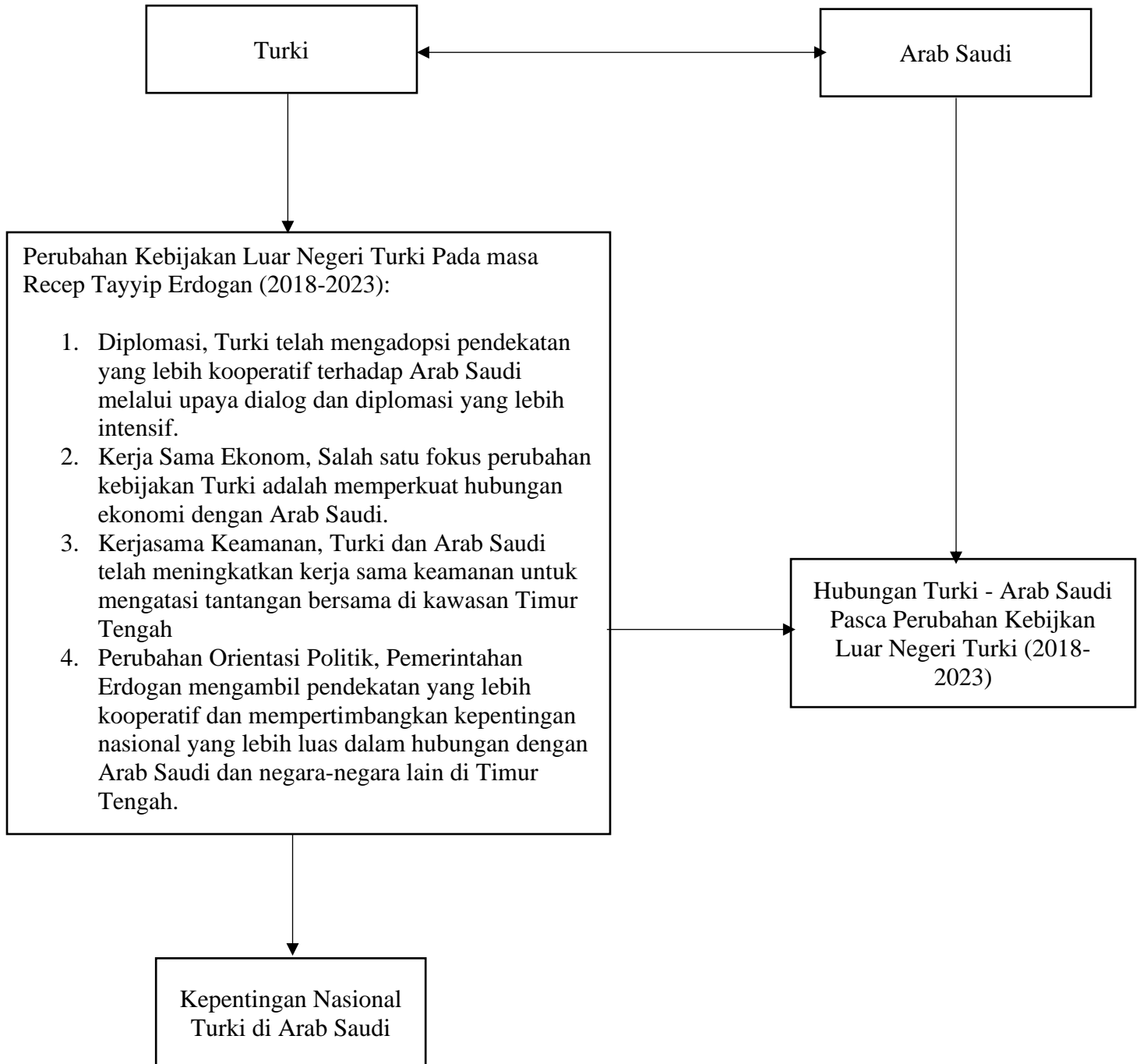
2.2 Kerangka Pemikiran

Perubahan Kebijakan Luar Negeri dari suatu negara merupakan suatu fenomena yang kompleks serta dinamis. Adapun faktor-faktor negara dapat merubah kebijakan luar negerinya, seperti adanya kepentingan nasional negara, Perubahan kondisi

Internasional, Pergantian kepemimpinan/pemerintahan suatu negara, faktor internal politik negara, ataupun evaluasi efektifitas kebijakan luar negeri yang sudah ada menjadi faktor yang bisa merubah Kebijakan Luar Negeri dari suatu negara. Turki merupakan negara yang merubah kebijakan luar negerinya di Timur Tengah, khususnya dengan negara Arab Saudi, Hal yang berubah dalam kebijakan luar negeri Turki ini tepatnya terjadi pada Periode Kedua dari Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan bagaimana Turki menjadi negara yang lebih kooperatif dalam menyelesaikan konflik/perbedaan pandangan dengan Arab Saudi yang terjadi di timur tengah. Sebelumnya Turki selalu menyelesaikan permasalahan/perbedaan pandangan dengan Arab Saudi dengan cara-cara yang agresif.

Hal ini dianggap berpengaruh akan peran turki di timur tengah, karena timur Tengah juga merupakan kawasan yang rentan Akan konflik di dunia. Dampak dari konflik yang di timbulkan di Timur Tengah tidak hanya terasa untuk kawasan tersebut saja, tetapi dapat juga berpengaruh luas terhadap stabilitas Keamanan Global. Turki merupakan salah satu negara yang memiliki letak geostrategis yang cukup baik di Timur Tengah. Jadi tidak heran jika Turki juga memiliki kepentingan-kepentingan yang cukup strategis di negara Arab Saudi, seperti kepentingan politik, ekonomi, dan Keamanan dan Agama. Apalagi Turki memiliki peran penting dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Di Timur Tengah sebelum tahun 2020 Turki menjalin hubungan yang kurang baik dengan negara-negera di kawasan Timur Tengah, salah satunya dengan negara Arab Saudi. Seperti adanya beberapa pandangan yang berbeda dengan isu atau konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Peristiwa

pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, pada Oktober 2018 di Konsulat Saudi di Istanbul, menjadi pemicu utama perubahan dalam hubungan antara Turki dan Arab Saudi. Dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri Turki yang lebih kooperatif dan multilateral ini diharapkan akan memperbaiki hubungan antara kedua negara kawasan Timur Tengah. Bahkan di timur tengah Turki memegang peran yang cukup penting dalam Perdagangan internasional dan energy hal ini akan cukup baik apabila Turki memiliki hubungan yang baik dengan Arab Saudi sehingga dapat mendukung kepentingannya juga. Dalam Kebijakan Luar Negerinya Turki memiliki tujuan yang bermaksud untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin di kawasan tersebut, melindungi Kepentingan Nasional dan mengatasi konflik yang terjadi di daerah tersebut. Jadi perubahan kebijakan luar negeri Turki dilakukan dengan pertimbangan kepentingan nasional negara Turki, Kemudian perubahan pendekatan mereka yang berubah terhadap de-eskalasi regional menandakan langkah menuju rekonsiliasi di kawasan, yang akan menormalkan situasi strategis dan ekonomi di kawasan tersebut. Singkatnya, terlepas dari masalah keseimbangan Arab Saudi, Iran, dan Israel, perubahan kebijakan luar negeri di Timur Tengah, Khususnya dengan Arab Saudi saat ini adalah pilihan yang baik bagi Turki untuk bergerak maju dalam kerja sama yang saling menguntungkan, apalagi dengan langkah ini akan mengurangi ketegangan dengan barat yang dulu selalu kritis terhadap kebijakan luar negeri Turki di timur tengah yang agresif. Tentunya dengan perubahan ini Akan terjalin respon hubungan yang baik dengan negara kawasan timur tengah, khususya dengan Arab Saudi setelah perubahan kebijakan luar negeri Turki yang cukup signifikan ini



Gambar 2. 1 Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti